

**TRANSFORMASI LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI ERA DIGITAL:
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INTERNAL ORGANISASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

***TRANSFORMATION OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS IN
THE DIGITAL ERA: THE INFLUENCE OF INTERNAL ORGANIZATIONAL
FACTORS ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL
REPORTS***

**Jandry Pieter Zifeyon Ratu Kadja¹, Alfred Tandirura Rantelobo², Fransiscus
Nicodemus Naiola³**

Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

E-mail: janrypieter1979@gmail.com¹, arantelobo@gmail.com²,
franznaiola06@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of human resource (HR) competence, user participation, and internal control systems on the accountability of regional fixed asset management. The background of this research is based on the issue of low accountability in fixed asset management within local governments, characterized by weak record-keeping, lack of supervision, and limited involvement of asset users. The study employs a quantitative approach using a survey method through questionnaires distributed to employees of the Regional Revenue and Asset Agency of East Nusa Tenggara Province. The data were analyzed using multiple linear regression to determine the effect of each variable on accountability. The issues underlying this research include persistent weaknesses in the management of regional fixed assets, such as inaccurate recording, inadequate reporting of asset conditions, and weak internal oversight. In addition, the competence of officials in managing assets is often insufficient, and user participation in maintaining and utilizing regional assets remains low. These conditions may reduce the level of accountability in fixed asset management, affecting the quality of local government financial reports and the effectiveness of public services. Therefore, an empirical study is needed to determine the extent to which these factors influence the accountability of regional fixed asset management.

Keywords: HR Competence, User Participation, Internal Control System, Accountability, Regional Fixed Assets.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM), partisipasi pemakai, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan rendahnya akuntabilitas pengelolaan aset tetap di lingkungan pemerintah daerah, yang ditandai dengan lemahnya pencatatan, kurangnya pengawasan, dan rendahnya keterlibatan pengguna aset. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data dianalisis

menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap akuntabilitas. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih ditemukannya kelemahan dalam pengelolaan aset tetap daerah, seperti pencatatan yang belum akurat, kurangnya pelaporan atas kondisi aset, serta lemahnya pengawasan internal. Selain itu, kompetensi aparatur dalam mengelola aset sering kali belum memadai, dan partisipasi pemakai dalam menjaga serta memanfaatkan aset daerah masih rendah. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan aset tetap yang berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah.

Kata Kunci: Kompetensi SDM, Partisipasi Pemakai, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, Aset Tetap Daerah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset tetap daerah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap daerah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar tercipta transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pengelolaan aset tetap daerah merupakan elemen vital dalam tata kelola keuangan daerah. Barang milik daerah yang termasuk aset tetap adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah maupun layanan publik. Tujuan pengelolaan aset tetap yang efektif dan efisien adalah untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta pemanfaatan aset secara optimal. Kegiatan pengelolaan tersebut meliputi serangkaian proses mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian,

pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, hingga pengawasan dan pengendalian aset milik daerah yang mencakup berbagai jenis aset seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, jaringan, serta aset lain termasuk konstruksi dalam pengerjaan.

Namun dalam praktiknya, masih banyak dijumpai permasalahan dalam pengelolaan aset tetap daerah: pencatatan yang berantakan, penggunaan aset yang tidak sesuai peruntukan, hingga lemahnya pengawasan internal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sejumlah laporannya terus menemukan temuan terkait pengelolaan aset tetap yang belum memadai, baik di aspek administrasi maupun pemanfaatan aset. Sistem *internal control* berperan sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa semua aktivitas pengelolaan aset berjalan sesuai peraturan dan tujuan organisasi. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), *internal control* terdiri dari lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (COSO, 2017).

Pengelolaan aset tetap daerah diatur melalui berbagai peraturan

perundang-undangan yang menetapkan kerangka hukum dan teknis agar pemerintah daerah dapat mengelola barang milik daerah secara akuntabel dan transparan. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur tata kelola keuangan serta barang milik negara atau daerah, menegaskan kewajiban pencatatan, penggunaan, dan pengawasan aset agar pertanggungjawabannya sah dan sesuai regulasi.

Aturan teknis lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan dalam regulasi pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Regulasi tersebut memberikan pedoman operasional terkait inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, dan pelaporan barang milik daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengelolaan aset tetap dilakukan secara efisien dan efektif, serta sejalan dengan prinsip *good governance* terutama dalam aspek keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik.

Lebih jauh, dengan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengelola aset secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah. Namun demikian, pengelolaan tersebut tetap harus dijalankan dengan mempertimbangkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kombinasi seluruh regulasi ini membentuk suatu sistem pengelolaan aset tetap daerah yang terstruktur, yang menjadi bagian penting dalam

mendukung penerapan *good governance* di tingkat pemerintahan daerah.

Istilah *accountability* berasal dari kata “*accountable*,” yang berarti bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan dan organisasi, akuntabilitas berarti kewajiban untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak berwenang serta masyarakat sebagai pemilik sumber daya tersebut (Mardiasmo, 2020).

Salah satu faktor krusial dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Menurut undang-undang ketenagakerjaan (UU No. 13/2003), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun masyarakat. SDM yang memiliki kompetensi baik cenderung memahami tugas dan tanggung jawab dengan baik sehingga mampu menjalankan pekerjaan secara optimal. Oleh karena itu, organisasi sebaiknya diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi tepat agar tugas dan fungsi dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Menurut (Bovens, 2021), akuntabilitas adalah adanya hubungan antara pelaku (pengelola) dan forum (pemegang kepentingan) di mana pelaku harus menjelaskan tindakannya dan menerima konsekuensi. Dalam konteks pengelolaan aset tetap daerah, akuntabilitas mengandung makna bahwa pengelola aset harus bertanggung jawab dalam pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pelaporan aset sesuai dengan peraturan dan tujuan organisasi (Rahman et al., 2022).

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggung

jawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan tugas kepada pihak yang berwenang dan masyarakat (Mardiasmo, 2020). Dalam konteks pengelolaan aset tetap daerah, akuntabilitas berarti pengelola aset harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan transparan, akurat, dan sesuai regulasi. Pengelolaan aset tetap daerah mencakup seluruh aktivitas pengadaan, pemeliharaan, pencatatan, pemanfaatan, dan pelaporan aset yang dimiliki pemerintah daerah guna mendukung pelayanan publik (Rahman et al., 2022). Akuntabilitas berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan aset tetap daerah dilakukan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas menuntut adanya transparansi dalam pelaporan dan penggunaan aset, yang akan meningkatkan kualitas pencatatan dan pengawasan aset sehingga meminimalisasi risiko kehilangan atau penyalahgunaan. (Rahman et al., 2022). Akuntabilitas yang baik akan memperkuat mekanisme pengendalian intern, yang berujung pada peningkatan kinerja pengelolaan aset tetap daerah. (Prasetyo dan Wibowo, 2021).

Faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah antara lain adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM), partisipasi pemakai, dan sistem pengendalian intern. Kompetensi SDM menjadi kunci dalam pengelolaan aset karena melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai dalam mengelola aset secara profesional (Widodo, 2022). Sementara itu, partisipasi pemakai aset, baik dari intern organisasi maupun masyarakat, diharapkan mampu mendorong pengelolaan aset yang lebih akuntabel dan transparan (Mardiasmo, 2018). Di sisi lain, sistem pengendalian intern berfungsi sebagai alat untuk meminimalisasi risiko penyimpangan

dan memastikan aset dikelola sesuai aturan yang berlaku (Moeller, 2016).

Faktor-faktor internal seperti kompetensi sumber daya manusia (SDM), partisipasi pemakai, dan sistem pengendalian intern merupakan komponen penting yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan aset tetap. Kompetensi SDM yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional menjadi prasyarat dalam pengelolaan aset yang akuntabel. Penelitian Wahid (2018) menunjukkan bahwa kompetensi SDM menyumbang hingga 83,1% terhadap efektivitas pengelolaan aset di Pemerintah Kota Bandung. Di sisi lain, rendahnya kapasitas SDM di berbagai OPD di NTT masih menjadi kendala dalam pengelolaan aset berbasis sistem informasi.

Partisipasi pemakai juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan aset. Keterlibatan aktif pengguna aset dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pengelolaan aset. Prasetyo dan Wibowo (2021) menyatakan bahwa partisipasi pemakai berkontribusi terhadap akuntabilitas dan efektivitas penggunaan aset tetap daerah.

Sementara itu, sistem pengendalian intern (SPI) yang efektif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko. SPI mencakup lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (COSO, 2017). Penelitian Sari dan Nugroho (2023) menemukan bahwa SPI memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada sektor publik, termasuk dalam pengelolaan aset.

Di era globalisasi dan transformasi digital yang pesat, kompetensi sumber daya manusia

(SDM) menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kompetensi SDM mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan adaptasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan perubahan di lingkungan kerja. Organisasi yang mampu mengembangkan kompetensi SDM secara berkelanjutan akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan global. (Wahyudi, 2024) menunjukkan bahwa pengembangan SDM, kompetensi, dan kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Studi ini menekankan pentingnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. (Widyatmoko, 2020) menyoroti peran kepemimpinan dalam pengembangan kompetensi SDM di sektor publik. Kepemimpinan yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan kompetensi karyawan.

Dengan mengangkat fenomena aktual dan berbasis data empirik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya meningkatkan tata kelola aset tetap daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan merupakan komponen utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset tetap tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, partisipasi pemakai, serta sistem pengendalian intern yang diterapkan.

Pengelolaan aset tetap daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Aset tetap, seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, dan peralatan lainnya, harus dikelola secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan aset tetap di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat bahwa terdapat aset daerah yang belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), atau data yang tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Selain itu, beberapa aset strategis seperti Hotel Plago di Labuan Bajo dan kapal wisata milik Pemprov NTT juga dilaporkan dalam kondisi terbengkalai dan tidak memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kurang optimalnya kompetensi aparatur dalam melakukan pencatatan, pengawasan, dan pelaporan aset tetap. Di sisi lain, rendahnya partisipasi pengguna aset (seperti OPD) dalam melaporkan kerusakan atau kondisi terkini aset yang mereka gunakan, memperparah kurangnya akuntabilitas pengelolaan. Fenomena ini penting untuk dikaji lebih lanjut agar dapat diketahui sejauh mana faktor-faktor seperti kompetensi SDM, partisipasi pemakai, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, khususnya pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

METODE

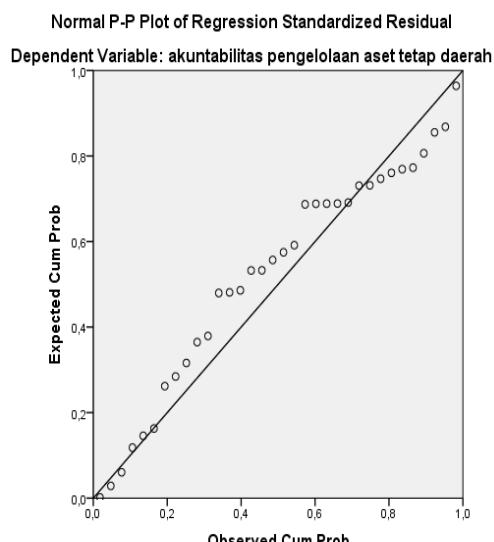
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Eltari No. 52, Kupang, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui pendekatan korelasional untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Sesuai dengan pandangan Uma Sekaran, pendekatan kuantitatif memanfaatkan data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistika, sedangkan metode verifikatif sebagaimana dijelaskan Sugiyono digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis terkait pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap, khususnya pegawai BPKAD dan OPD yang bertanggung jawab atas barang milik

daerah, dengan jumlah total 34 orang. Sampel ditentukan melalui purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman minimal satu tahun dalam pengelolaan aset serta keterlibatan langsung dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset; ukuran sampel dapat dihitung menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap proses pengelolaan aset, wawancara dengan pegawai terkait, telaah dokumentasi resmi seperti laporan keuangan dan SOP, serta penyebaran kuesioner berskala Likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Dalam hal ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* dan uji *One-Sample Kalmogorov-Smirnov*.



Gambar 1. Hasil Uji Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Data Penelitian Yang Diolah, 2025

Hasil pengujian dengan analisis grafik plot di atas menunjukkan bahwa model regresi terdistribusi dengan normal, dikarenakan titiktitik menyebar di sekitar diagonal serta penyebaran

mengikuti arah diagonal. Adapun hasil pengujian dengan uji *One-Sample Kalmogorov-Smirnov*, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,00577250
Most Extreme Differences	Absolute	,155
	Positive	,099
	Negative	-,155
Test Statistic		,155
Asymp. Sig. (2-tailed)		,037 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari hasil pengujian di atas, diperoleh nilai *Asymp. Sig.* Sebesar 0,037. Dimana nilai signifikansi harus lebih besar dari 0,05 ($0,037 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa data terdistribusi normal. Dan data dapat digunakan untuk proses pengujian selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi

atau keterikatan antar variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara variabel independen: Yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Kompetensi SDM	,399	2,509
	Partisipasi Pemakai	,485	2,061
	Sistem Pengendalian Intern	,559	1,790

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Sumber: Data Penelitian Yang Diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 diatas, maka didapat hasil yang akan dijelaskan di bawah ini:

a. Nilai *tolerance* variabel Kompetensi SDM (X_1) sebesar 0,399 dan nilai VIF dari variabel Kompetensi SDM (X_1) sebesar 2,509. Dari data ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel

Kompetensi SDM karena nilai *tolerance*-nya lebih besar dari 0,10 ($0,399 > 0,10$) dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10 ($2,509 < 10$).

b. Nilai *tolerance* variabel Partisipasi Pemakai (X_2) sebesar 0,485 dan nilai VIF dari variabel Partisipasi Pemakai (X_2) sebesar 2,061. Dari data ini menunjukkan bahwa tidak terdapat

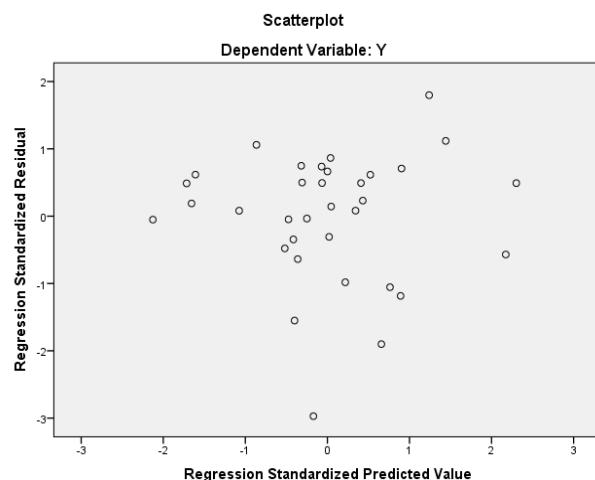
gejala multikolinearitas pada variabel Partisipasi Pemakai karena nilai *tolerance*-nya lebih besar dari 0,10 ($0,399 > 0,10$) dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10 ($2,061 < 10$).

- c. Nilai *tolerance* variabel Sistem Pengendalian Intern (X_3) sebesar 0,559 dan nilai VIF dari variabel Sistem Pengendalian Intern (X_3) sebesar 1,790. Dari data ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel Sistem Pengendalian Intern karena nilai *tolerance*-nya lebih besar dari

0,10 ($0,559 > 0,10$) dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10 ($1,790 < 10$).

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Scatter Plot*. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode *Scatter Plot* diperoleh sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian Yang Diolah, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar di atas, menunjukkan bahwa grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran,

di mana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Uji regresi linear berganda

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1	(Constant)	20,710	8,207		2,524	,017
	Kompetensi SDM	,357	,177	,401	2,014	,053
	Partisipasi Pemakai	-,055	,137	-,073	-,403	,690
	Sistem Pengendalian Intern	,401	,150	,450	2,681	,012

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Sumber: Data Penelitian Yang diolah, 2025

$$Y=20,710 + 0,357 X_1 + (-0,055) X_2 + 0,401 X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut diketahui nilai konstanta sebesar 20,710 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah adalah sebesar 20,710 satuan, nilai Kompetensi SDM (X_1) memiliki koefisien interaksi sebesar 0,357 satuan, Partisipasi Pemakai (X_2) memiliki koefisien interaksi sebesar (-0,055) satuan dan Sistem Pengendalian Intern (X_3) Memiliki koefisien interaksi sebesar 0,401. Sehingga berdasarkan hasil uji regresi berganda nilai b_2 bernilai positif signifikan. Untuk mengetahui nilai persamaan regresi dan nilai koefesien korelasi b_3 dipergunakan data pada tabel berikut:

Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel

dependen. Kriteria pada pengujian secara parsial (uji t) ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$ atau $t_{signifikan} < 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$ atau $t_{signifikan} > 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Adapun, hasil uji secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Pengujian Hipotesis 1 (H1): Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Tabel 4. Hasil Uji t untuk Hipotesis 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29,839	7,903		3,776	,001
	,573	,121	,643	4,751	,000

a. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah

Sumber: Data Penelitian Yang Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 di atas, diperoleh hasil bahwa variabel Kompetensi SDM (X_1) memiliki thitung sebesar 4,751 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan ttabel ($\alpha=0,05$; $df=30$) adalah sebesar 2,04227. Karena thitung $>$ ttabel, yaitu $4,751 > 2,04227$, atau nilai sig t (0,000) $<$ α (0,05), maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa,

Kompetensi SDM (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah(Y).

Pengujian Hipotesis 2 (H2): Partisipasi Pemakai terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Tabel 5. Hasil Uji t untuk Hipotesis 2

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1	(Constant)	44,572	7,810		5,707	,000
	Partisipasi Pemakai	,349	,120	,458	2,918	,006

a. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah

Sumber: Data Penelitian Yang Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 di atas, diperoleh hasil bahwa variabel Partisipasi Pemakai (X2) memiliki thitung sebesar 2,918 dengan signifikansi sebesar 0,006 dan ttabel ($\alpha=0,05$; $df=30$) adalah sebesar 2,04227. Karena thitung > ttabel, yaitu $2,918 > 2,04227$, atau nilai sig t (0,000) $< \alpha (0,05)$, maka H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, Partisipasi

Pemakai (X2) berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah (Y).

Pengujian Hipotesis 3 (H₃): Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Tabel 6. Hasil Uji t untuk Hipotesis 3

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1	(Constant)	27,204	7,828		3,475	,001
	Sistem Pengendalian Intern	,598	,117	,672	5,134	,000

Sumber: Data Penelitian Yang Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 di atas, diperoleh hasil bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) memiliki thitung sebesar 5,134 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan ttabel ($\alpha=0,05$; $df=30$) adalah sebesar 2,04227. Karena thitung > ttabel, yaitu $5,134 > 2,04227$, atau nilai sig t (0,000) $< \alpha (0,05)$, maka H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, Sistem Pengendalian Intern (X3) berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap (Y).

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika signifikan F lebih kecil dari taraf signifikan 5%, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama. Sebaliknya jika nilai signifikan F lebih besar dari taraf signifikan 5% maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	590,034	3	196,678	11,143 ,000 ^b
	Residual	529,525	30	17,651	
	Total	1119,559	33		

a. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah
b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM , Partisipasi Pemakai dan Sistem Pengedalian Intern

Sumber: Data Penelitian yang Diolah, 2025

Dari tabel ANOVA menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,000. Hal ini menggambarkan variabel Kompetensi SDM, Partisipasi Pemakai, dan Sistem Pengendalian Intern bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah hal ini dengan mengikuti taraf signifikan 0,05 dan yang terjadi di bawah 0,05 (0,000), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X1,X2,X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Penggunaanya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,726 ^a	,527	,480	4,20129

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengedalian Intern, Partisipasi Pemakai, Kompetensi SDM
b. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah

Sumber, Data Penelitian Yang Diolah, 2025

Dari tabel di atas memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (Kompetensi SDM, Partisipasi Pemakai, Sistem Pengendalian Intern) terhadap variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah) sebesar 0,480 atau 48%, sedangkan 52% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh penulis.

SIMPULAN

Penelitian ini membahas tiga variabel bebas yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah yaitu Kompetensi SDM, Partisipasi Pemakai dan Sistem Pengendalian Internal pada 34 responden yang diteliti. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompetensi SDM memiliki hasil Uji parsial (Uji-t), dengan hasil uji signifikan parsial (Uji-t), hal ini dapat dilihat dimana nilai t hitung >

- t table yaitu $4,751 > 2,04227$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dalam hasil penelitian ini menyimpulkan (H1) diterima. Hal ini menunjukkan Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan secara Parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan aset Tetap Daerah. Artinya semakin tinggi Kompetensi SDM maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah yang diberikan.
2. Partisipasi Pemakai memiliki hasil Uji parsial (Uji-t), dengan hasil uji signifikan parsial (Uji-t), hal ini dapat dilihat dimana nilai t hitung $> t$ table yaitu $2,918 > 2,04227$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,006 < 0,05$. Maka dalam hasil penelitian ini menyimpulkan (H2) diterima. Hal ini menunjukkan Partisipasi Pemakai berpengaruh positif dan signifikan secara Parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan aset Tetap Daerah. Artinya semakin tinggi Partisipasi Pemakai maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah yang diberikan.
 3. Sistem Pengendalian Intern hasil Uji parsial (Uji-t), dengan hasil uji signifikan parsial (Uji-t), hal ini dapat dilihat dimana nilai t hitung $> t$ table yaitu $5,134 > 2,04227$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dalam hasil penelitian ini menyimpulkan (H3) diterima. Hal ini menunjukkan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan secara Parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan aset Tetap Daerah. Artinya semakin tinggi Sistem Pengendalian Intern maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah yang diberikan.
 4. Dari perhitungan diperoleh bahwa Kompetensi SDM, Partisipasi pemakai dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah, hal ini dapat dilihat dari uji F mempunyai nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Yang dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan (H4) diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- COSO. (2017). Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi, IAIN Surakarta. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6281/>
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri. S(2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Mardiasmo, D. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo, D. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Moeller, R. R. (2016). Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge (8th ed.). John Wiley & Sons.
- Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Prasetyo, E., & Wibowo, A. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*, 8(2), 134-145.
- Prasetyo, E., & Wibowo, A. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*, 8(2), 134-145.
- Rahman, F., Kusuma, R., & Santoso, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 10(1), 50-65.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 92.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244.
- Sari, D., & Nugroho, B. (2021). *Partisipasi Pemakai dan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah*. *Jurnal Riset Akuntansi Daerah*, 9(4), 301–314.
- Sari, L. P., & Nugroho, A. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan pada Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia*, 27(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jaai.v27i1.2023>
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, A. Y. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Bandung. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Widodo, J. (2022). Manajemen Aset Publik: Teori dan Praktik di Pemerintahan Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widyatmoko, B. (2020). Kepemimpinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik. *Jurnal Dialogue*, 1(1)